



Peran Dinas Komunikasi Dan Informatika Dalam Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Sidoarjo

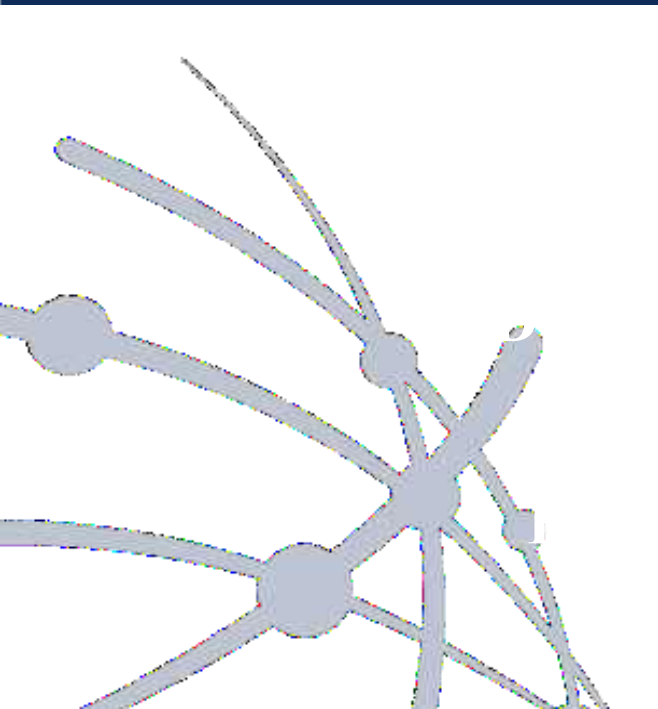
Oleh :

Charista Diva Vernanda

(212020100106)

Pembimbing : Ilmi Usrotin Choiriyah, S.AP., M.AP

PRODI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO



Pendahuluan

Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik adalah kewajiban lembaga publik untuk menjalankan tugas pemerintahan. informasi publik adalah salah satu karakteristik praktik manajemen *good governance*. Keterbukaan informasi akan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif. Secara positif akan berkontribusi untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan efektif, karena pemerintah dan lembaga publik memberikan informasi yang jelas, transparan, dan bertanggung jawab tentang kegiatan mereka. Keterbukaan informasi publik adalah asas krusial dalam pengelolaan pemerintahan. Di Indonesia, terdapat peraturan perundang undangan Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Undang – Undang No 14 Tahun 2008

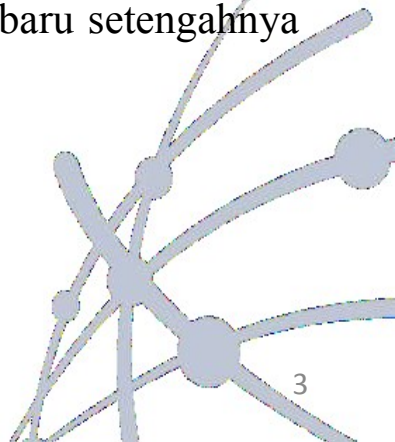
UU ini menekankan pentingnya transparansi sebagai cara untuk meningkatkan akuntabilitas serta keterlibatan masyarakat melalui pemerintahan. Informasi yang bersifat publik adalah hak serta kebutuhan bagi setiap masyarakat, informasi publik harus dapat diperoleh dengan akurat dan faktual. Penerapan UU KIP mengikat kedua pihak, yaitu penyelenggara badan publik dan masyarakat, sehingga setiap badan publik wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini selaras dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Di Sidoarjo penunjukan PPID merujuk pada Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/474/438.1.1.3/2018 dimana bertugas untuk mengelola dan menyajikan informasi publik guna mempermudah akses bagi masyarakat.

Pendahuluan

Peran Diskominfo Dalam Keterbukaan Informasi

Pada zaman modern saat ini, peran Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) krusial terhadap transparansi informasi di daerah karena memiliki peran strategis dalam memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat. Sebagai lembaga publik Diskominfo diketahui memiliki program bidang yang bervariasi mengacu pada renstra yang dikeluarkan Diskominfo tahun 2021-2026 terdapat 4 program salah satunya adalah bidang program pengelolaan informasi dan komunikasi publik. Dari bidang tersebut didapatkan program kerja yang dijalankan untuk menunjang keterbukaan informasi di Sidoarjo dengan melakukan pembuatan aplikasi/web inovasi pelayanan, yaitu dengan pembuatan aplikasi/web inovasi pelayanan publik seperti E-Buddy, Sp4n Lapor, dan 112 Sidoarjo Call Center.

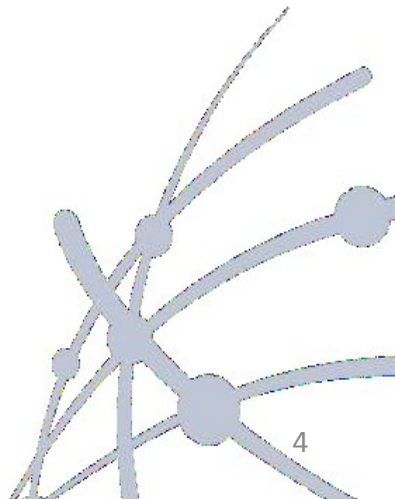
Serta menyelenggarakan Rapat Desk Review untuk mengoptimalkan keterbukaan informasi publik, yang bertujuan untuk peninjauan ulang dan pendampingan terhadap DIP. Di mana daftar informasi publik merujuk pada dokumen yang berisi keterangan terstruktur mengenai semua informasi publik yang dikuasai oleh lembaga publik. Kegiatan lain yang dilakukan Diskominfo Sidoarjo adalah dengan melakukan pendampingan terkait domain desa.id pada setiap desa. Berdasarkan data tahun 2024 dari Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab Sidoarjo dengan total kurang lebih 350 desa dan kelurahan yang ada di Sidoarjo, hingga saat ini baru setengahnya yang sudah memiliki domain desa.id



PERMASALAHAN

Minimnya sumber daya manusia yang mumpuni hal ini terkait loyalitas pegawai yang belum sepenuhnya merata dan dapat mempengaruhi totalitas kinerja

Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap keterbukaan informasi.



PENELITIAN TERDAHULU

- Mochammad Alfin Azrial Akbar, dkk (2024)

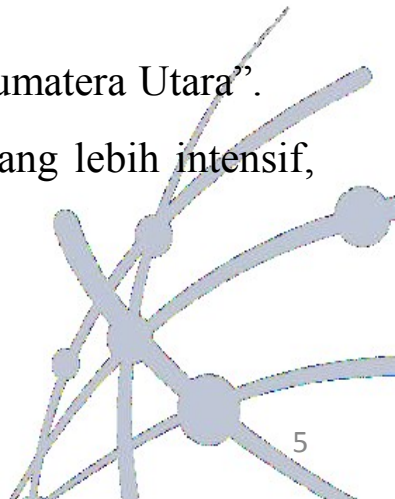
“Implementasi Program Informasi Dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sidoarjo”. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan pelaksanaan program tergantung pada efektivitas komunikasi pada penyelenggara kebijakan.

- Lathifah Chairunnisa dkk (2023)

“Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang”. Hasil temuan pada penelitian ini mengindikasikan keberhasilan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik membutuhkan dukungan serta keterlibatan dari pihak-pihak terkait.

- Anggie Pandji Alam (2023)

“Efektivitas DISKOMINFO Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Melalui PPID Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara”. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa diperlukan adanya keterbukaan dalam pengelolaan dana, penyuluhan yang lebih intensif, serta peningkatan kualitas PPID di Kota Medan.



METODE



Jenis Penelitian

Penelitian Kualitatif dengan Metode Deskriptif



Teknik Analisis Data

- Pengumpulan Data
- Reduksi Data
- Penyajian Data
- Penarikan Kesimpulan



Fokus Penelitian

Terkait bagaimana peran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori dari Pitana dan Gayatri dengan indikator

- 1) Motivator
- 2) Fasilitator
- 3) Dinamisator

METODE



Lokasi penelitian

Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Sidoarjo



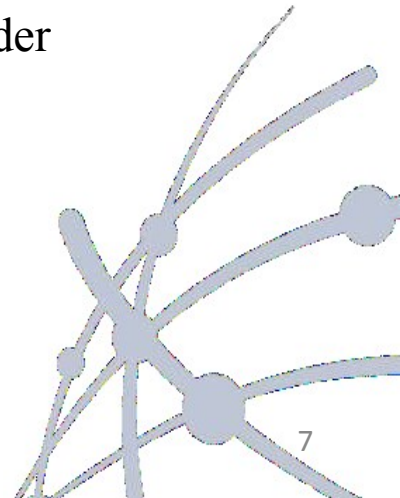
Teknik Pengumpulan Data

Wawancara, Observasi, dan
Dokumentasi



Sumber Data

Data primer dan data
sekunder

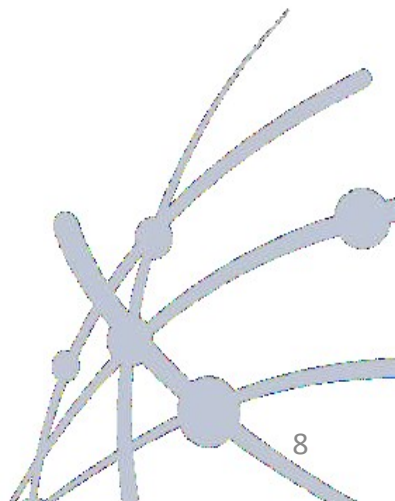


HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Motivator**

Menurut Pitana dan Gayatri motivator dalam hal ini adalah bagaimana pemerintah daerah berfungsi sebagai lembaga yang memiliki posisi strategis dengan kewenangan yang signifikan, sehingga memberikan pengaruh besar dalam mendorong instansi sektoral untuk mendukung transparansi informasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo memainkan peran vital dalam meningkatkan aksesibilitas informasi publik di Sidoarjo. Melalui beragam program dan inisiatif, Diskominfo berusaha memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses informasi yang relevan dan penting, sesuai dengan ketentuan UU KIP Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan temuan dari hasil wawancara, peran motivator yang dilakukan oleh Diskominfo dengan melakukan kegiatan sosialisasi atau rapat desk review dengan para organisasi perangkat daerah (OPD). Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap OPD memiliki sistem yang memadai dalam menyediakan informasi publik yang benar kepada masyarakat, kegiatan ini difokuskan pada peninjauan ulang dan pendampingan DIP dari masing-masing OPD

Gambar 1. Rapat *Desk Review* DIP

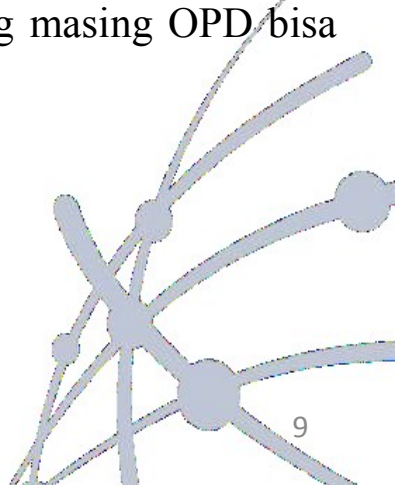


HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Motivator**

Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan desk review DIP pada tahun 2024 dilaksanakan dua kali, pada kegiatan pertama pihak Diskominfo merasa belum mendapatkan hasil maksimal dari DIP pada setiap OPD yang membuat diperlukannya pelaksanaan kegiatan review kembali agar mendapatkan hasil akhir yang sesuai. Pada kegiatan desk review yang telah menghasilkan DIP dari setiap OPD menjadi suatu tolak ukur bahwa para pihak terkait juga mengerti atau paham terkait dengan kebutuhan keterbukaan informasi publik itu sendiri, walaupun ditemukan bahwa adanya sedikit tantangan terkait dengan perlunya pendisiplinan kepada para pihak OPD. Berdasarkan wawancara ditemui bahwa dengan kegiatan desk review DIP dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperbaharui dan mengoptimalkan penyusunan DIP serta mendorong keterbukaan informasi, dimana kegiatan ini melibatkan 34 OPD dan 18 Kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai OPD serta pihak desa. Pada kegiatan ini hasil review akan ditetapkan sebagai DIP dari setiap OPD di Kabupaten Sidoarjo.

Dinas Komunikasi dan Informatika Sidoarjo juga telah mengklasifikasikan informasi publik untuk menghasilkan DIP sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010, yang mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2008. Klasifikasi ini mencakup informasi setiap saat, secara berkala, serta merta dan informasi yang dikecualikan. DIP sendiri menjadi pedoman untuk pemantauan dan evaluasi oleh Komisi Informasi Jawa Timur (KI Jatim) dan pada tahun 2024, Sidoarjo memperoleh skor 87,25 dengan predikat "menuju informatif," hal ini diharapkan dapat terus berkembang menjadi salah satu daerah dengan predikat "informatif" di tahun 2025 ini. Berdasarkan temuan didapati bahwa kegiatan desk review DIP berjalan dengan cukup baik walaupun dari segi ketertiban dari masing masing OPD bisa ditingkatkan.

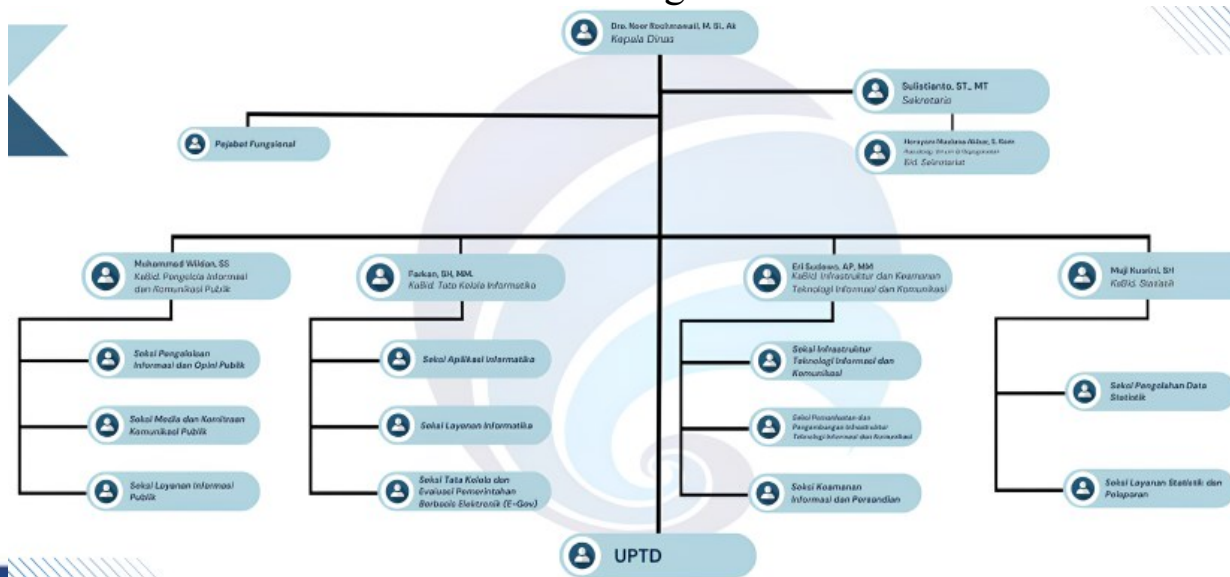


HASIL DAN PEMBAHASAN

• Fasilitator

Menurut Pitana dan Gayatri Menurut Pitana dan Gayatri Fasilitator berfungsi pemerintah sebagai penyedia sarana yang mendukung pengelolaan. Sebagai badan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan publik, dan berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah, maka Diskominfo harus dapat memberikan fasilitas yang mendukung berbagai program dan aktivitas yang nantinya dapat mendorong transparansi informasi dengan konteks keterbukaan. Berdasarkan temuan, ditemukan fasilitator dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya yakni anggaran serta sumber daya, Sumber daya manusia merupakan elemen krusial dalam setiap organisasi, berikut adalah struktur Dinas komunikasi dan informatika serta pendidikan akhir pegawai bidang PIKOM yaitu :

Gambar 2. Struktur Organisasi



Tabel 2. Pendidikan Terakhir Pegawai Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Jumlah Pegawai Bidang PIKOM	Pendidikan Akhir	Pegawai
29 Pegawai	Sarjana	17 Orang
	SMA/Sederajat	12 Orang

HASIL DAN PEMBAHASAN

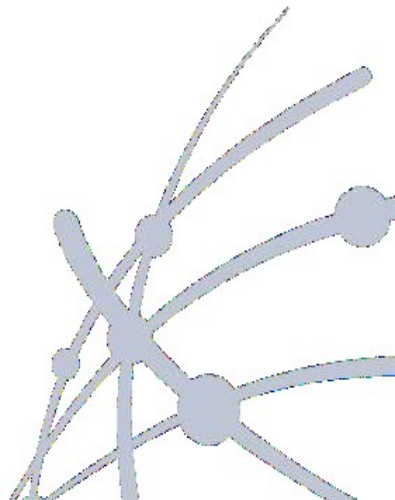
- **Fasilitator**

Berdasarkan wawancara ditemui bahwa adanya loyalitas dari setiap pegawai yang tidak merata hal ini dapat berpengaruh pada totalitas kinerja yang di berikan oleh para pegawai, Dikarenakan pegawai dengan pendidikan SMA juga bisa memiliki loyalitas yang lebih bagus daripada yang berpendidikan S1, hal ini berarti membuat pendidikan akhir yang dimiliki setiap pegawai tidak serta merta meningkatkan kinerja / loyalitas itu sendiri. Hal tersebut menjadi satu tantangan tersendiri yang dihadapi. Hal ini membuat dimana sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kinerja serta juga memiliki hubungan terkait dengan produktivitas, moralitas dan juga loyalitas.

Selanjutnya faktor lain dari indikator fasilitator adalah anggaran. Anggaran adalah salah satu hal yang memiliki peranan yang sangat krusial, Proses penyusunan anggaran yang efektif harus mampu menggambarkan kebutuhan yang nyata, dan menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya berlangsung dengan maksimum. Berdasarkan wawancara bidang Pikom sudah bisa memaksimalkan anggaran yang diterima karena pemaksimalan anggaran dilakukan dengan mengagendakan segala tugas yang diberikan, hal ini membuat anggaran menjadi efektif untuk menunjang tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Walaupun terdapat penurunan anggaran di tahun 2024 akan tetapi hal ini disebabkan karena agenda yang ditugaskan tidak sebanyak di tahun anggaran 2023.

Tabel 3. Anggaran Bidang Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik Tahun 2023-2024

Tahun	Anggaran
2023	Rp. 3.395.703.930
2024	Rp. 2.869.265.200

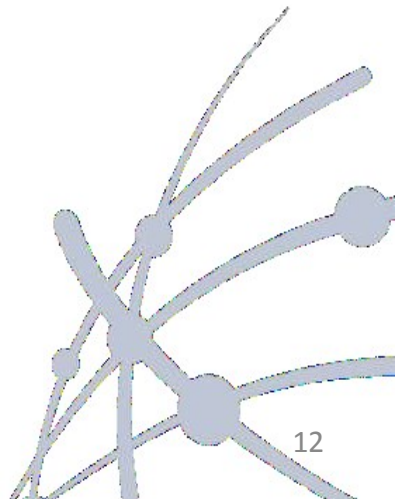


HASIL DAN PEMBAHASAN

- **Dinamisator**

Menurut Pitana dan Gayatri Dinamisator adalah terkait dengan bagaimana pemerintah daerah dalam mengintegrasikan antara swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah bertanggung jawab dalam menciptakan kolaborasi yang baik, hal ini juga berlaku kepada OPD yang juga berperan sebagai pendorong utama pembangunan. Peran Dinamisator dalam tata kelola pemerintahan yang baik terwujud melalui kolaborasi antara masyarakat, sektor publik, dan sektor swasta. Berdasarkan wawancara ditemukan bahwa peran Diskominfo dengan melakukan kegiatan memfasilitasi pembuatan domain desa atau website desa.id dimana setiap desa yang ingin membuat website desa dapat bersurat kepada Diskominfo Sidoarjo yang nantinya akan dibantu dalam proses pengajuan kepada pihak pemerintah pusat atau kementerian komunikasi dan digital (KOMDIGI). Selain itu diskominfo juga melakukan pelatihan konten website desa.id, pengelolaan website sendiri memiliki fokus utama untuk memberikan informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, meskipun ada tantangan dalam hal pemahaman teknologi di kalangan operator.

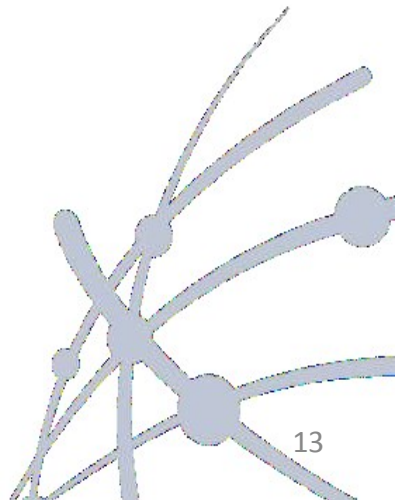
Gambar 3. Pelatihan Konten Website desa.id



HASIL DAN PEMBAHASAN

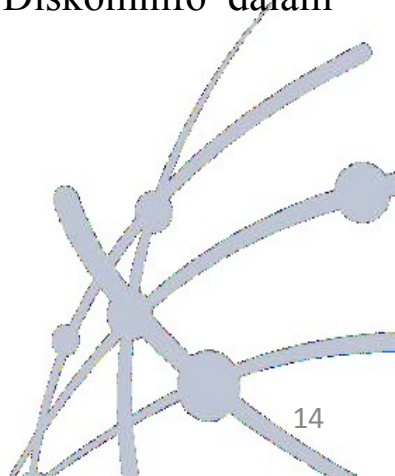
- **Dinamisator**

Mengenai partisipasi masyarakat, Partisipasi masyarakat yang baik dapat meningkatkan mutu layanan karena dapat mendorong akuntabilitas serta transparansi. Berdasarkan wawancara ditemukan bahwa partisipasi masyarakat di Sidoarjo seharusnya bisa lebih tinggi, namun terdapat beberapa tantangan salah satunya adalah respon partisipasi yang kurang kuat dari masyarakat. Dimana partisipasi masyarakat pada beberapa tahun sebelumnya memang belum paham terkait dengan keterbukaan informasi, hal ini membuat Diskominfo melakukan sosialisasi untuk mengenalkan keterbukaan informasi itu sendiri. Dan dari hasil sosialisasi masyarakat sedikitnya mulai tahu terkait dengan keterbukaan informasi, walaupun hasil yang di dapatkan juga belum bisa dikatakan optimal. Dan juga, dapat diamati bahwa pemahaman masyarakat mengenai keterbukaan informasi atau PPID baru berkembang dalam beberapa tahun terakhir, hal ini yang berpengaruh kepada respon terhadap partisipasi dalam keterbukaan informasi publik.



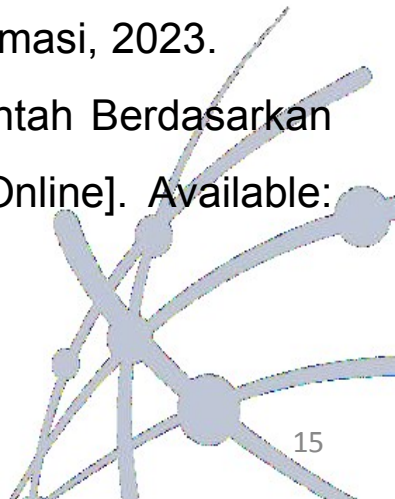
KESIMPULAN

Berdasarkan indikator peran menurut Pitana dan Gayatri masih terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan untuk diskominfo dalam penerapan keterbukaan informasi di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. Jika ditinjau dari indikator teori peran menurut pitana dan gayatri adalah sebagai berikut: indikator motivator, menunjukkan bahwa Diskominfo telah melakukan kegiatan desk review daftar informasi publik (DIP) hal ini menunjukkan adanya motivasi yang diberikan oleh Diskominfo kepada para OPD hingga ke pihak desa yang ditujukan untuk mendorong keterbukaan informasi. Selanjutnya, indikator fasilitator terdapat dua faktor penting yaitu SDM serta anggaran pada faktor SDM ditemukan bahwa kinerja yang diberikan oleh setiap pegawai akan bervariasi, disebabkan oleh perbedaan tingkat loyalitas dari masing-masing individu terhadap organisasi. Pada faktor anggaran tidak ditemukan adanya tantangan karena anggaran sudah dapat dimaksimalkan dengan baik, yang terakhir adalah indikator dinamisator, pada indikator ini Diskominfo menjalankan kegiatan fasilitasi pembuatan domain desa.id yang diketahui hingga tahun 2024 baru sekitar setengah desa dari total 350 desa dan kelurahan yang memilikinya. Serta ditemui adanya tantangan dari Diskominfo terkait partisipasi masyarakat yang tidak memberikan respon kuat terhadap keterbukaan informasi terlebih dari tingkat desa. hal ini menjadi fokus dari Diskominfo maupun bidang Pikom untuk mendorong transparansi hingga ketingkat pemerintahan desa. Berdasarkan kesimpulan diatas maka diharapkan dapat memberi pemahaman, pengetahuan, gambaran tentang peran Diskominfo dalam keterbukaan informasi publik di Kab. Sidoarjo.



REFERENSI

- [1] B. G. Peters and J. Pierre, *Handbook of public policy*. 2006. doi: 10.4135/9781848608054.
- [2] S. Andriany and A. Ariyanti, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Dan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang," *J. Ilmu Adm. dan Stud. Kebijak.*, vol. 6, no. 1, pp. 35–52, 2023, doi: 10.48093/jiask.v6i1.159.
- [3] D. A. Rahayu, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Komunikasi Publik Media Sosial Pada Kaum Milenial Di Kota Denpasar," *J. Ilm. Cakrawarti*, vol. 7, no. 1, pp. 52–57, 2024, doi: 10.47532/jic.v7i1.982.
- [4] A. Riyanto, "Pemahaman Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik," *J. Huk. Pembang.*, vol. 42, no. 4, p. 381, 2012, doi: 10.21143/jhp.vol42.no4.270.
- [5] L. Nawawi and H. Sonjaya, Trisna, "Penerapan Keterbukaan Informasi Melalui Monitoring Dan Evaluasi Pada Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Banten," vol. 2, no. 2, 2024, doi: DOI: <https://doi.org/10.61332/antasena.v2i2.241> 186.
- [6] Ira Guslina, T. Mardiana, and N. Indriane, *Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik*. indonesia: Komisi Informasi, 2023.
- [7] M. Maringka, H. Sabijono, and C. Datu, "Analisis Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Pada Dinas Pariwisata Kota Manado," vol. 8, no. 3, pp. 348–357, 2024, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekososbudkum/article/view/55058>

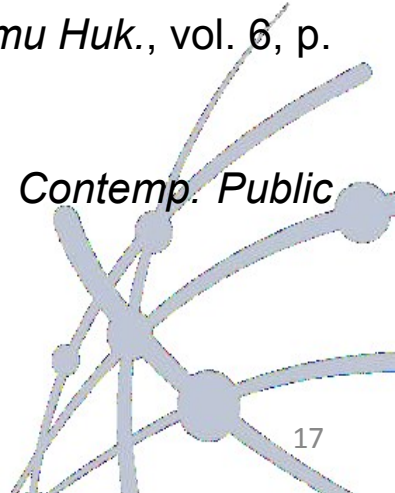


REFERENSI

- [8] P. Wijonarko *et al.*, "Pengenalan Website sebagai Media Informasi dan Promosi Desa Introduction," vol. 2, no. 4, 2024, doi: <https://doi.org/10.61132/mengabdi.v2i4.865>.
- [9] M. Alfin, A. Akbar, and I. U. Choiriyah, "Implementasi Program Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo," pp. 1–9, 2024.
- [10] L. L. Chairunnisa, F. Habibi, R. Berthanila, F. Habibi, and R. Berthanila, "Analisis Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kota Serang," *J. Ilmu Adm. Negara*, vol. 11, no. 2, pp. 31–45, 2023, doi: 10.47828/jianaasian.v11i1.158.
- [11] A. Alam, "Efektifitas DISKOMINFO Dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik Melalui PPID Di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara," vol. 11, no. 1, pp. 1–15, 2023, [Online]. Available: <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017>
- [12] A. T. Alvioni, D. Miradhia, and B. Bonti, "Keterbukaan Informasi Publik DI Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bandung Barat," *JANE - J. Adm. Negara*, vol. 14, no. 1, p. 152, 2022, doi: 10.24198/jane.v14i1.41278.
- [13] D. K. D. Ottay, A. J. Rorong, and D. L. Tampongangoy, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah di Kecamatan Sario Kota Manado," *Jap*, vol. 8, no. 115, pp. 10–17, 2022. H. A. Nimr, "Defuzzification of the outputs of fuzzy controllers," presented at 5th Int. Conf. on Fuzzy Systems, 1996, Cairo, Egypt. 1996.

REFERENSI

- [14] M. Alamsyah and A. Saepudin, "Loyalitas Pegawai Di Lingkungan Kerja Pemerintahan Dinas Pemuda Dan Olahraga Jawa Barat," *Maeswara J. Ris. Ilmu Manaj. dan Kewirausahaan*, vol. 2, no. 2, pp. 01–05, 2024, doi: 10.61132/maeswara.v2i2.665.
- [15] R. R. Rahmadani, "Strategi Dalam Mengoptimalkan Penggunaan Dari Anggaran Perencanaan Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kec.Lareh Sago Halaban," vol. 7, no. 11, pp. 20–24, 2024.
- [16] C. Rahayu, B. Damanik, V. A. Tanjung, and H. Anggraini, "Literature Review : Analisis Penyusunan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Literature Review: Analysis of Budget Preparation for Regional Health Service Organizations," vol. 7, no. 8, pp. 3337–3346, 2024, doi: 10.56338/jks.v2i1.636.
- [17] R. R. Rahmadani, "Strategi Dalam Mengoptimalkan Penggunaan Dari Anggaran Perencanaan Daerah Terhadap Pembangunan Ekonomi Di Kec.Lareh Sago Halaban," vol. 7, no. 11, pp. 20–24, 2024.
- [18] I. Affan, "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah," *LEGA LATA J. Ilmu Huk.*, vol. 6, p. 131, 2021.
- [19] Ni Wayan Desi Budha Jayanti, "Urgensi Partisipasi Masyarakat dalam Public Governance di Indonesia," *J. Contemp. Public Adm.*, vol. 3, no. 2, pp. 51–58, 2023, doi: 10.22225/jcpa.3.2.2023.51-58.



REFERENSI

- [20] S. Nelly, “Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Publik,” *J. Sociopolitico*, vol. 6, no. 1, pp. 87–95, 2024, [Online]. Available: <https://fisipolupgriplk.ac.id/jurnal/index.php/JSP/article/view/119>
- [21] A. Savina, E. Yulyana, and L. D. Mahendra Putri, “Pelaksanaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik PPID Kabupaten Karawang (Tantangan Dan Strategi Dalam Meningkatkan Partisipasi Publik),” vol. 5, no. 4, pp. 6445–6450, 2024.

